

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arsana, I. P. J. (2016). Manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah, Yogyakarta, Deepublish.
- Kumar, Ranjit. 2014. *Research Methodology: Step-by-Step Guide for beginners*, London: Sage.
- Kumorotomo, Wahyu. (2005). *Akuntabilitas birokrasi publik : sketsa pada masa transisi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- LAN Dan BPKP. (2000). *Akuntabilitas Dan Good Governance*, Jakarta: LAN RI.
- Moenir, A.S. (2010). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta. Bumiaksara
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung Barat, PT. Rosdakarya.
- Mardiasmo, M. (2018) *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta, ANDI.
- Budiardjo, M., Anwar, M., Majid, N., & Crouch, H. A. (1998). *Menggapai kedaulatan untuk rakyat: 75 tahun Prof. Miriam Budiardjo*. Bandung, Mizan Pustaka.
- Santosa, P. (2008). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Alfabet.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta.
- Suyatno, Bagong. Dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan* . Jakarta : Kencana.

Rahayu, A. Y. S. (2020). Pelayanan publik dan e-government: sebuah teori dan konsep, Depok, PT. Rajagrafindo Persada.

Sedarmayanti, P. S. (2013). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, Bandung PT. Refika Aditama.

Rakhmat, (2018). Administrasi dan akuntabilitas publik, Yogyakarta, ANDI.

Tambunan, T. T. (2021). UMKM di Indonesia: perkembangan, kendala, dan tantangan. Jakarta, Prenada Media.

Willem, Siahaya. (2012). Manajemen Pengadaan, Procurement Management. Bandung. Alfabeta

Jurnal

Ahmad, A., Adys, A. K., & Haq, N. (2020). Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Blpbj) Sekretariat Daerah Kota Makassar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 2(2), 85–92.
<https://doi.org/10.26618/jppm.v2i2.4564>

Anjani, W. S., Hanapiah, P., & Rudiana. (2019). Pendapatan secara internal meliputi. 5(2), 189–203

Azmy, N. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (E Procurement) di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar*. Universita Hasanudin.

Dama, Y., Rotinsulu, T. O., & Walewangko, E. N. (2020). Pengaruh Implementasi E-Purchasing, Akses Pasar, Dan Persaingan Bisnis Terhadap Prinsip Akuntabel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Joournal Pembangunan ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(04), 39–53.

Damayanti, A., & Hamzah, A. (2011). Pengaruh e-procurement terhadap Good Governance.

- Damayunita, A. (2022). Analisis Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di Lembaga Pemerintah Kota Palangkaraya. *Jurnal Manajemen Dan Sains*, 7(2), 1004–1007. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.651>
- Diani, F., & Lubis, F. A. (2022). Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1970-1981.
- Endianingsih, D. (2014). Peran e-catalogue dalam proses pengadaan elektronik. *Jurnal kalibrasi*, 12(1).
- Eprocurement-indonesia.com. (2021). *Hubungan E Government Dan E Procurement*. <https://eprocurement-indonesia.com/hubungan-e-government-dan-e-procurement/>
- Gunawan, S. (2019). Implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bulukumba. In *Universitas Muhammadiyah Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Imelda, I., & Arkum, D. (2019). Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Sebagai Pelaksana “BANG MUDA.” *Jurnal Studia Administrasi*, 1(2), 17–35. <https://doi.org/10.47995/jian.v1i2.24>
- Irsan. 2012. “Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Simpur di Bandar Lampung”. Tesis. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Iqbal, M. (2020). Pengaruh Pelaksanaan E-katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Umkm. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 77-97.
- Mawarni, M., Gamaputra, G., Meilinda, S. D., No, J. K., & Ketintang, G. (2020). Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog. *Wacana Publik*, 14(02), 81-92.
- Maani, K. D. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Demokrasi*, 8(1).

- Muharam, R. S. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Di Kota Bandung. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 1(01), 39. <https://doi.org/10.23969/decision.v1i01.1401>
- Nasyaa, S. R., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan E-Katalog dan Pemko Medan Terhadap Kesejahteraan. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 313-316.
- Nugroho, Y. S., Halim, A., & Zulkifli, Z. (2019). *Akuntabilitas Publik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta* (Doctoral dissertation, STIE Widya Wiwaha).
- Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* ISSN.
- Putri, D. A., Sunarya, A., & Fatah, Z. (2023). Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa E-Katalog Di Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya. *Soetomo Administrasi Publik*, 1(2), 117-130.
- Rahmah, H. (2023). Keterlibatan Pelaku Umkm Binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Medan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui E-Katalog Lokal. *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 1(11), hal 1-2.
- Salam, R. (2021). Perubahan dan inovasi pelayanan publik di era new normal pandemi covid-19. *Journal of Public Administration and Government*, 3(1), 28-36.
- Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 10-18.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas organisasi sektor publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17-26.

Zaenal Arifin, “Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”, Jurnal Respsif Vol 5, No.5, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2017, Medan, hal 56.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah

Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik Dan E-Purchasing

Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Online dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Walikota Baubau No. 61 Tahun 2022 tentang standar satuan harga barang dan jasa lingkup pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2023.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.Pan/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 58/Kep/M.Pan/9/2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian dan Penghargaan Citra Pelayanan Cintra Sebagai Unit Pelayanan Percontohan.



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

NO.	INDIKATOR	PERTANYAAN
1.	Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kebijakan tersebut mengungkapkan kemudahan akses untuk mendapatkan informasi terkait fungsi dan kinerja dari organisasi ? 2. Bagaimana bentuk trnsparansi dalam mendapat Informasi terkait kebijakan E-katalog?
2.	Pertanggung jawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah terdapat konsekuensi atas kinerja organisasi ? 2. Bagaimana bentuk konsekuensi tersebut ?
3.	Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah organisasi melakukan sesuai yang di targetkan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut ? 2. Bagaimana cara agar organisasi bisa menjalankan kebijakan tersebut dengan tepat sesuai dengan kebijakan tersebut ?
4.	Tanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah organisasi mengikuti aturan yang berlaku ? 2. Bagaimana bentuk aturan tersebut ?
5.	Responsivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah organisasi memenuhi target yang sesuai kebutuhan atau permintaan dari adanya kebijakan tersebut ? 2. Bagaimana bentuk dalam memenuhi harapan atau target dari kebijakan tersebut ?

THESIS.docx

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	8%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journals.usm.ac.id Internet Source	2%
2	eprint.stieww.ac.id Internet Source	1%
3	ojs.pseb.or.id Internet Source	1%
4	repository.ummat.ac.id Internet Source	1%
5	repository.uniyap.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
7	www.kajianpustaka.com Internet Source	1%
8	e-katalog.lkpp.go.id Internet Source	1%
9	ppid.jogjaprov.go.id Internet Source	1%
10	jurnal.umsu.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%